

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.¹

Jika kita melihat isi dari Undang-undang No.22 tahun 1999 mengenai kewenangan daerah, adanya kewenangan yang diberikan pada daerah, dalam hal ini kabupaten dan kotamadya, maka daerah akan lebih mempunyai kewenangan untuk mengoptimalkan potensinya.²

Pada dasarnya Otonomi Daerah memuat substansi "Tiga-De" : desentralisasi (penyerahan urusan), dekonsentrasi (pelimpahan wewenang), serta demokratisasi politik dan ekonomi. Desentralisasi berarti penyerahan tugas-tugas pemerintahan dari level yang lebih tinggi ke tingkat otonomi yang lebih rendah, yang lazim disebut desentralisasi riil. Penyerahan urusan dimaksudkan harus disertai dengan *perangkat, perlengkapan dan sumber pembiayaan* (dikenal dengan istilah "tiga-p").

Pelimpahan wewenang atau dekonsentrasi, berarti pelimpahan tugas-tugas dari departemen / kementerian di pusat kepada dinas-dinas di bawah pemerintah daerah yang disebut dengan tugas perbantuan. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk optimalisasi penyelenggaraan fungsi pokok pemerintahan, yang mencakup : **pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan**. Dalam fungsi pelayanan, terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemandirian kolektif masyarakat, sedangkan dalam fungsi pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.³

¹ Undang-undang No.22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah

² Menteri Otonomi Daerah: Ryaas Rasyid, Surat Kabar Suara Merdeka, tanggal 28-10-1999

³ Bercermin di Kalbu Rakyat, Pemikiran dan Gagasan SriSultan HB X di Era Reformasi, 1999.

Prinsipnya otonomi daerah adalah penataan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hirarki dan kesatuan wilayah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Otonomi daerah juga akan menuntut aparat pemerintah yang berkemampuan, sehingga masyarakat secara nyata memperoleh manfaat dari adanya otonomi itu. Satu hal yang sering dilontarkan sebagai kritik terhadap sistem dan mekanisme kerja pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah 'birokrasi, rangkaian kerja yang terlalu bertele-tele'. Satu pengurusan ijin misalnya, harus melalui berbagai seksi dengan masing-masing selang waktu yang cukup panjang. Belum lagi unsur individu yang semakin menambah ketidakefektifan pelayanan. Hal ini di satu segi justru akan sangat menghambat peningkatan pelayanan pada masyarakat dan berarti juga menghambat laju percepatan pembangunan yang tinggi, disegi lain akan memberikan citra yang buruk dari Pemerintah di mata masyarakat, yang dengan demikian tidak mendorong satu rasa kebersamaan, saling keterkaitan dan terlenih lagi akan menjadikan masyarakat acuh serta mengabaikan pemerintah. Satu hal yang tidak kita inginkan tentunya.

Dengan demikian, sejalan dengan proses percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, birokrasi yang bertele-tele harus semakin dihilangkan, agar hal ini dapat menumbuhkan satu rasa kebersamaan dari rakyat pada pemerintah.⁵

1.1.2. Relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi

Adanya pemisahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi menjadi 2 wilayah Tingkat II, yaitu Kotamadya Dati II Sukabumi dan Kabupaten Dati II Sukabumi merupakan suatu langkah untuk mengendalikan laju pertumbuhan yang terlalu pesat di wilayah kotamadya, dan itu juga merupakan konsep dari desentralisasi. Konsep desentralisasi ini juga bertujuan untuk mengimbangi pertumbuhan di wilayah Kabupaten Sukabumi sehingga tercapai pemerataan pembangunan.⁶

Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II merupakan wadah kegiatan Pemerintah Daerah di bidang eksekutif, dalam aktivitasnya melayani masyarakat, dengan kata lain kantor Kabupaten merupakan kantor Bupati dengan aparat Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mengelola daerah. Sehingga Kantor Kabupaten bisa juga disebut wadah pertemuan

⁴ Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Ginanjar Kartasasmita, hal 346.

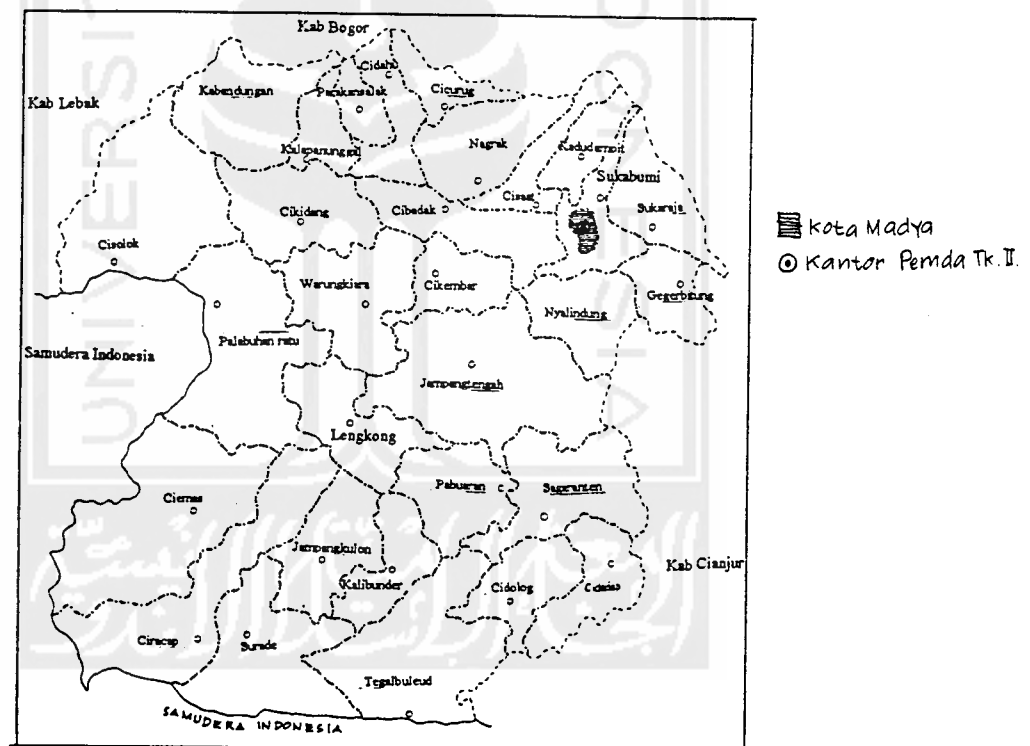
⁵ Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, The Liang Gie.

⁶ Sukabumi Mandiri, permda Kab. Dati II Sukabumi, 1999.

antara pemerintah Daerah (bupati beserta staf-stafnya) dengan masyarakat sebagai objek pelayanan.

Bagi suatu daerah Otonom Tingkat II yang ibukotanya berada di luar daerah wilayahnya akan mengakibatkan kurang leluasaan dan tidak mungkin untuk mengatur dan menata kota / daerah arahnya yang dikuasai oleh Daerah Otonom Tingkat II lainnya⁷

Dengan posisi bangunan kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang pada saat ini berada di wilayah Kotamadya Dati II Sukabumi, sangat relevan apabila merelokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi untuk berada di wilayah /daerah arahnya sehingga optimasi dan keterpaduan pelayanan dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten dan Posisi Kantor Pemerintah Kab.Dati II Sukabumi

Sumber : Renc. Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II Sukabumi

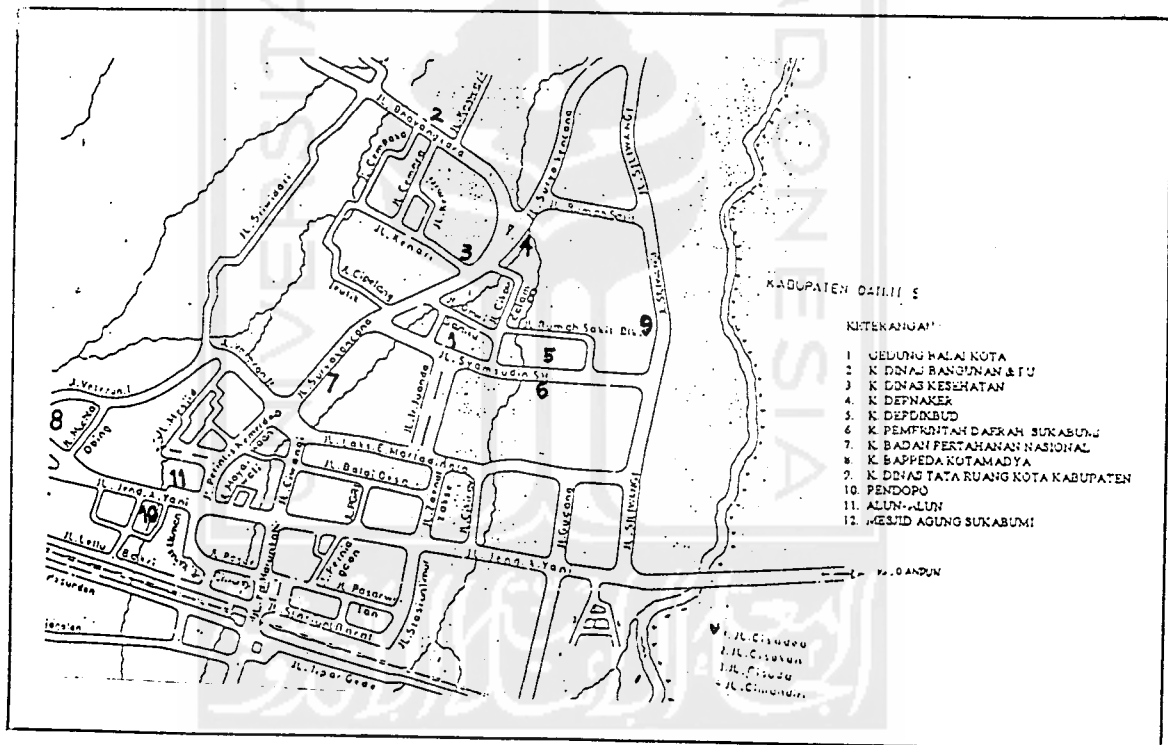
1.1.3. Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan

Kondisi bangunan kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang jaraknya jauh dengan daerah-daerah arahnya (untuk mencapai daerah tertentu diperlukan waktu sekitar 4 jam). Dengan kondisi demikian sangat tidak efektif bagi pemerintah dalam

⁷ Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah dan Perkotaan, E. Koswara, 1996.
Tugas Akhir

mengambil keputusan penting yang cepat dan tepat untuk pengendalian daerahnya, dan intinya pelayanan masyarakat menjadi tidak optimal karena jauhnya jarak jangkauan. Selain itu karena selama ini ibu kota kabupaten sekaligus ibukota kotamadya berada di wilayah Sukabumi bagian utara, menyebabkan daerah utara lebih berkembang karena distribusi pelayanan masyarakat tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk Sukabumi bagian selatan, kurang untuk berkembang dan optimal karena distribusi pelayanan terhambat.

Selain itu, kondisi yang terjadi pada Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi juga menghambat pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sehingga optimasi pelayanan pada masyarakat tidak dapat tercapai. Seperti pada gambar peta berikut ini :

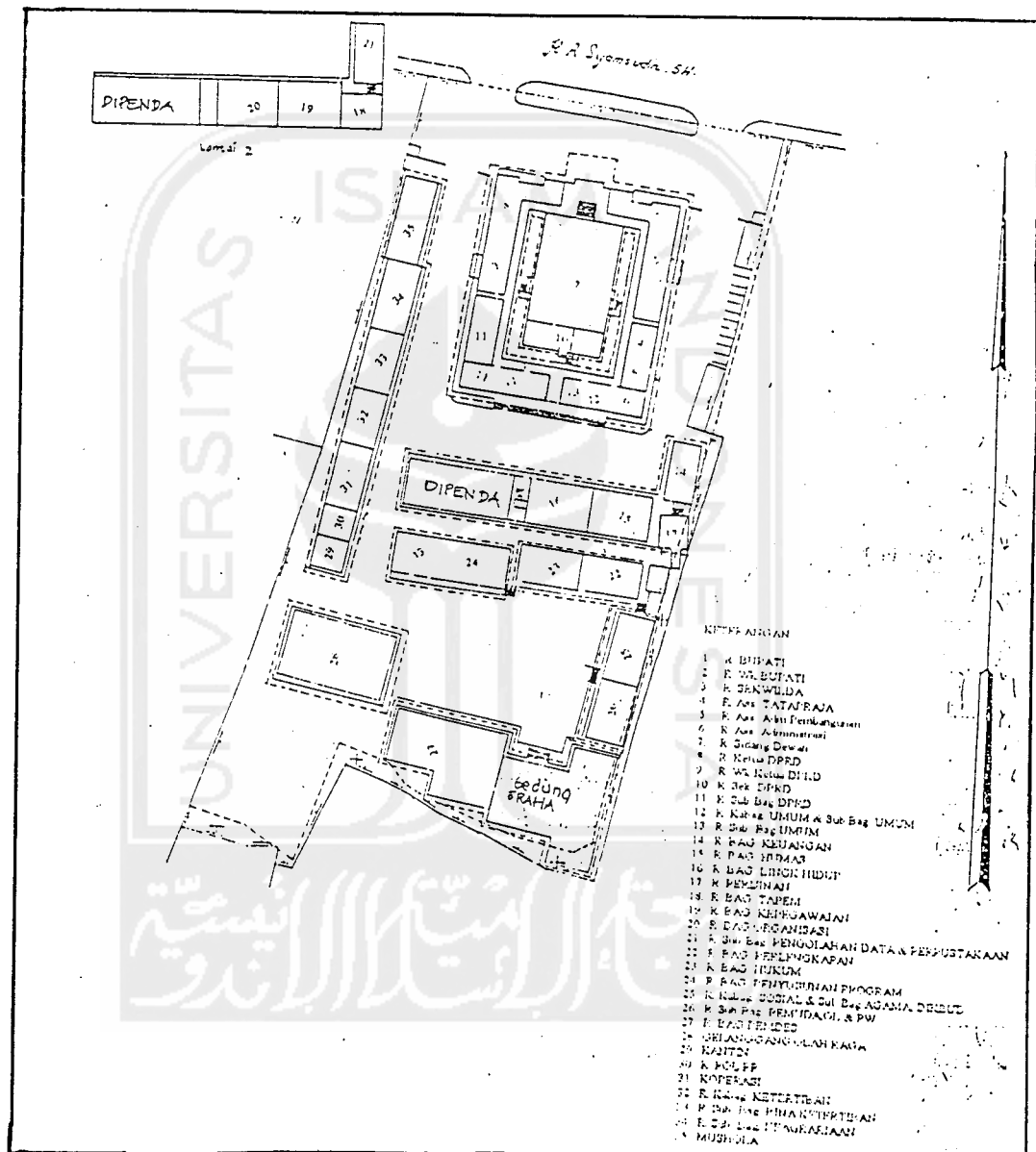


Gambar 1.2. Peta Lokasi Kantor Instansi Kabupaten Sukabumi
Sumber : Renc. Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II Sukabumi

Gambar tersebut menjelaskan bahwa lokasi instansi-instansi kantor pemerintah kabupaten daerah tingkat II Sukabumi terpencar-pencar, dan itu juga merupakan suatu hambatan koordinasi, sehingga keterpaduan pelayanan tidak tercapai.

Begitu juga dengan kondisi bangunan Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang terletak di jalan R. Syamsudin, SH, mengenai pengelompokan ruangnya yang tidak teratur,

baik berdasarkan sifat kegiatannya maupun berdasarkan hirarki pelayanan. Hal ini penting menjadi perhatian untuk menciptakan keterpaduan yang mempertimbangkan kemudahan dalam pelayanan serta pengawasan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang berlangsung.⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar denah berikut ini:



Gambar 1.3. Denah Kantor Pemerintah Kab. Dati II Sukabumi

Sumber : Permda Sukabumi

Hal itu disebabkan pada awalnya bangunan tersebut adalah bangunan kantor lama yang mengalami berbagai perubahan, dan terjadilah pengelompokan ruangan seadanya, karena kebutuhan mendesak dan lahan terbatas.

⁸ Time Saver Standard For Buildings Types 2nd Edition, Mac Graw-Hill International Book Comp, hal 491. Tugas Akhir

Selain itu tidak adanya kejelasan pola sirkulasi akan menyebabkan terhambatnya pelayanan pada masyarakat. Seperti pada foto berikut yang menunjukkan bahwa tidak adanya sebagai sarana sirkulasi yang menghubungkan bangunan satu dengan bangunan lainnya yang saling berkaitan, akan menimbulkan hambatan peningkatan pelayanan.



Gambar 1.4. Salah satu ruang sirkulasi yang tidak mendukung pada peningkatan pelayanan
Sumber : Dokumentasi penulis, 1999

Situasi diatas sekaligus dijadikan alasan perpindahan dan perancangan kembali Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Sukabumi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu serta memberikan citra bangunan pusat pemerintahan yang berwibawa dan mewujudkan pusat pemerintahan berada di ibukota Kabupaten Sukabumi yang berada di wilayah/ daerah arahnya.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Masalah Umum

Apakah dengan relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi optimasi dan keterpaduan pelayanan pada masyarakat dapat tercapai?

1.2.2. Masalah Khusus

1. Pemilihan lokasi yang dekat dengan daerah arahnya sehingga mempermudah jangkauan pelayanan pada masyarakat.
2. Pola tata ruang yang merepresentasikan keterpaduan pelayanan pada masyarakat.
3. Sistem sirkulasi yang mendukung pelayanan yang optimal

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Mendapatkan Konsep Dasar Perancangan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang merespon pelaksanaan otonomi daerah melalui optimasi dan keterpaduan pelayanan pada masyarakat.

1.3.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai yaitu memperoleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Site yang tepat guna mendukung optimasi dan keterpaduan pelayanan pada masyarakat.
2. Pola tata ruang layanan publik terpadu.
3. Sistem sirkulasi yang mendukung pola tata ruang baik internal maupun eksternal.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Untuk menunjukkan keaslian penulisan tugas akhir ini diambil langkah dengan meninjau dan membandingkan dari beberapa hasil tugas akhir lain yang mengambil judul yang sama yakni tentang Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II. Judul tugas akhir yang dijadikan bahan perbandingan itu adalah sebagai berikut :

1. "Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung Sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah" oleh Muhammad Nur Hidayat – 1996.
 - Permasalahan Umum
Bagaimana aspek pengembangan kegiatan dengan segala fasilitasnya yang akan diwadahi dalam sistem perkantoran Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dalam usaha untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi administratif sesuai dengan perkembangan potensi daerah.
 - Permasalahan Khusus
 - a. Bagaimana penataan dan pengembangan tata ruang dalam bagi perkantoran Pemerintah Daerah yang ideal, dikaitkan dengan kondisi lahan yang terbatas.
 - b. Bagaimana pola sirkulasi yang dapat menunjukkan adanya kesatuan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah.
 - c. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan Kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sebagai wadah kegiatan perkantoran dan merupakan pusat pemerintahan.

2. “ Kantor Kabupaten Dati. II Musi Banyuasin – Sekayu Sumatera Selatan” oleh Ery Susandah – 1994.

- Permasalahan Non Arsitektural (soft ware / non teknis)

Bagaimana meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang citra kota.

- Permasalahan Arsitektural (hard ware / teknis)

a. Bagaimana merencanakan / merancang suatu kompleks pemerintahan Kabupaten DT II Musi Banyuasin menjadi pusat orientasi warga kota baik secara simbolis maupun fungsional, melalui ungkapan tata ruangnya.

b. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan Kantor Bupati sebagai salah satu prioritas utama wadah kegiatan pemerintahan DT II Musi Banyuasin, yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

1.5. Lingkup Pembahasan

Lingkup wilayah yang dibahas adalah Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Sukabumi yang direlokasi dari daerah kota madya Sukabumi ke kecamatan Palabuhan Ratu. Serta pembahasan dibatasi pada permasalahan yang dihadapi khususnya permasalahan Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Sukabumi untuk tercapainya optimasi dan keterpaduan pelayanan, dengan menekankan pada pemilihan lokasi dan site, pola tata ruang dan sistem sirkulasi.

1.6. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam menyusun pendekatan pemecahan permasalahan serta konsep perencanaan dan perancangan ini adalah :

1.6.1. Metode Pengamatan (Observasi)

Dalam tahap ini gagasan yang akan diambil berdasarkan :

1. Isu-isu yang ada yaitu bahwa lokasi atau kedudukan Kantor Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sukabumi tidak berada di daerah arahnya sehingga optimasi dan keterpaduan pelayanan tidak tercapai.
2. Informasi yang berupa data-data dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Sukabumi, dari Bappeda serta Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Bangunan.

1.6.2. Analisa

Untuk menuju kepada konsep perencanaan dan perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi akhir, optimasi dan keterpaduan pelayanan yang diharapkan dikaitkan dengan teori yang diperoleh dari literatur serta **membandingkan (komparasi)** sistem pelayanan yang diberikan Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Yogyakarta, sebagai daerah otonomi percobaan.

1.6.3. Sintesa

Untuk menuju kepada konsep perencanaan dan perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi akhir, lokasi, kegiatan serta keruangan yang telah dianalisa, disimpulkan untuk mendukung pada proses perancangan berikutnya.

1.7. Sistematika Penulisan

- a. Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, keaslian penulisa, lingkup bahasan, metode pembahasan, sistematika penulisan, dan pola pikir.
- b. Tinjauan dari relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Sukabumi yang diawali dengan mengemukakan deskripsi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi lengkap dengan kondisi potensi serta gambaran mengenai kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.
- c. Tinjauan terhadap kriteria yang menjadi tolak ukur Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi untuk mencapai optimasi dan keterpaduan pelayanan.
- d. Tinjauan mengenai hasil studi perbandingan dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sebagai daerah otonomi percobaan, berkaitan dengan sistem pelayanan yang diberikan sesuai dengan Undang – Undang Otonomi Daerah tahun 1999.
- e. Mengemukakan analisa mengenai kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Sukabumi sesuai dengan permasalahan yang ada untuk mencapai optimasi dan keterpaduan pelayanan.
- f. Mengemukakan konsep perancangan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dari mulai penentuan lokasi sampai dengan penampilan bangunan.

POLA PIKIR

LATAR BELAKANG

Isue
 * Lokasi kantor Pemerintah Kab. Dati II tidak berada di daerah arahnya, shg optimasi & keterpaduan pelayanan tidak tercapai

Rumusan Masalah
 Umum : Apakah dengan relokasi Kantor Pemerintah Kab. Dati II Sukabumi, Optimasi & Keterpaduan pelayanan dapat tercapai?
 Khusus :
 1. Pemilihan lokasi yang dekat dengan daerah arahnya sehingga mempermudah jangkauan pelayanan pada masyarakat
 2. Pola tata ruang yang merepresentasikan keterpaduan pada masyarakat
 3. Sistem sirkulasi yang mendukung pelayanan optimal

Tujuan
 * mendapatkan konsep dasar perancangan Kantor Pemda Sukabumi yang merespon Pelaksanaan otonomi daerah melalui Optimasi dan keterpaduan pelayanan

Sasaran
 1. Site yang tepat guna mendukung keterpaduan & optimasi
 2. Pola tata ruang layanan publik terpadu
 3. Sistem sirkulasi yg mendukung pola pola tata ruang, baik eksternal maupun internal

Langkah Batasan
 * pemilihan site
 * Pola tata ruang
 * Sistem sirkulasi

Metode Pembahasan
 * melakukan studi komparasi dengan kantor Pemda di daerah Otonomi percobaan

Konsep Dasar Perancangan
 * pemilihan lokasi
 * penzonningan
 * gubahan massa
 * pola sirkulasi
 * program ruang
 * struktur
 * utilitas
 * penampilan bangunan

Diagram 1.1. Pola Pikir

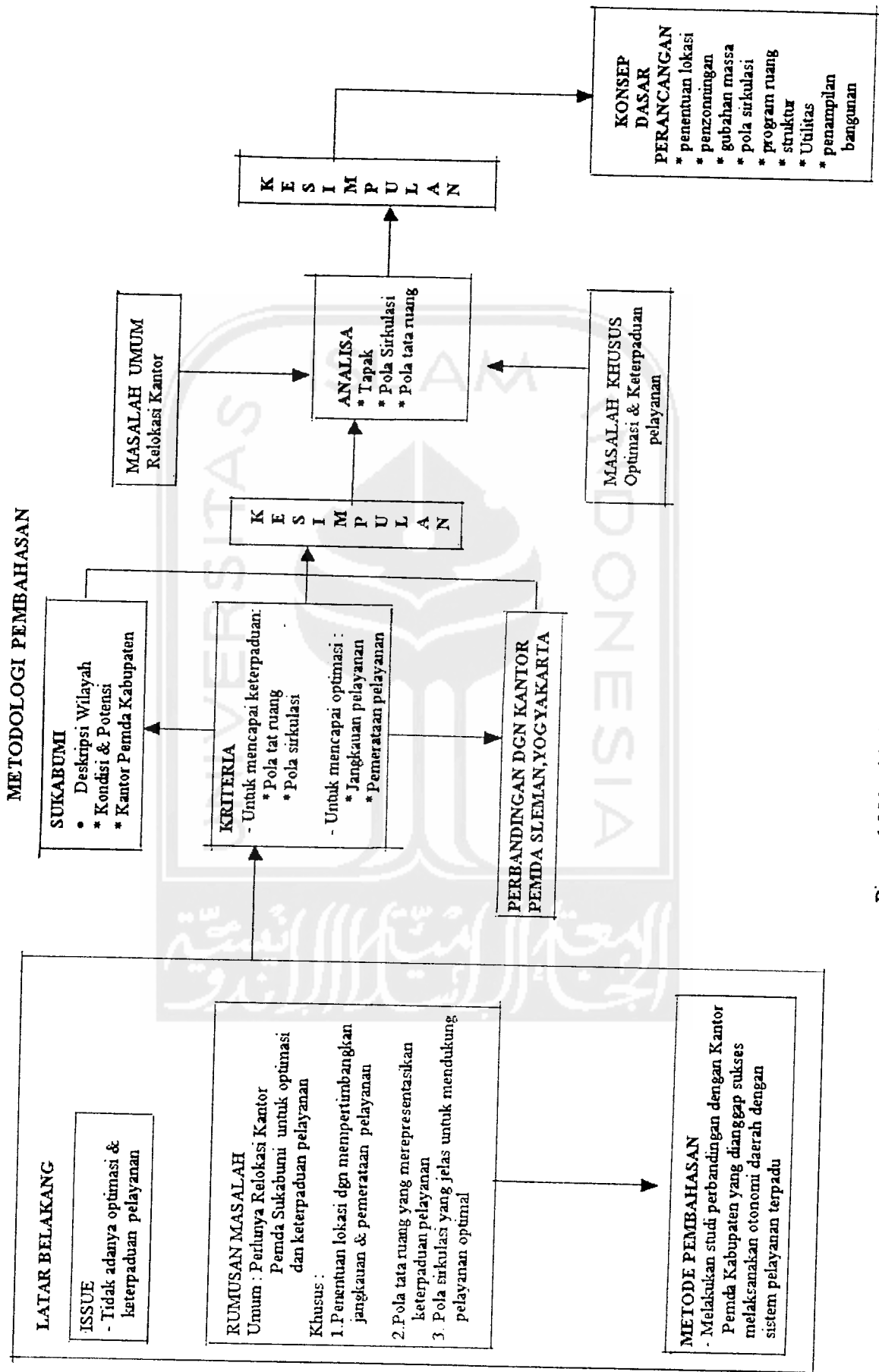


Diagram 1.2. Metodologi Pembahasan